

BAGIAN KETIGA KEKUASAAN POLITIK

Cara penafsiran ilmu politik sebagai ilmu tentang kekuasaan adalah cara yang relatif baru daripada kedua cara pendefinisian lainnya (secara institusional dan fungsional). Penyelidikan peranan "konsep kekuasaan" dalam ilmu politik dimulai kira-kira antara 1925–1950, ketika beberapa sarjana ilmu politik menyadari peranan yang dimainkan oleh faktor kekuatan (*force*) dalam kehidupan sosial manusia (Isjwara, 1980: 45).

Penafsiran ilmu politik sebagai ilmu tentang kekuasaan, paling banyak dianut para sarjana ilmu politik negara-negara Anglo-Amerika. Di Amerika penafsiran tersebut dikenal dengan "Aliran Chicago". Termasuk para sarjana penganut aliran ini antara lain: Charless Merriam, F.Schuman, Harold D.Lasweel, dan George Catlin.

A. KEKUASAAN DALAM ARTI UMUM

Menurut C. Wright Mills, kekuasaan adalah dominasi, yaitu kemampuan untuk melaksanakan kemauan kendatipun orang lain menentanginya (The Liang Gie, 1986: 20). Sedangkan menurut Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial, melakukan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemampuan ini (Budiardjo, [ed.], 1983: 16). Van Doorn, yang tampak melihat antara kekuasaan dan tindakan manusia, menyatakan: kekuasaan sebagai kemungkinan untuk membatasi alternatif-alternatif bertindak dari seseorang atau suatu kelompok sesuai dengan tujuan dari pihak pertama (Budiardjo, [ed.], 1983: 17). R.J.Mokken, memperluas pendapat van Doorn, bahwa kekuasaan tidak hanya membatasi tetapi juga memperluas alternatif-alternatif bertindak.